

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)**



**OLEH :**

**DWITHA RIRIS ANGGRAINI NAINGGOLAN**

**B111 13 088**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2017**

**HALAMAN JUDUL**

**Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak  
Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)**

**Oleh:**

**Dwitha Riris Anggraini Nainggolan**

**B111 13 088**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2017**



## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

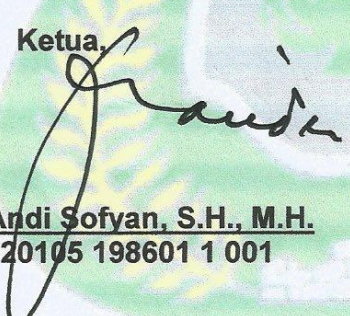
**DWITHA RIRIS ANGGRAINY**

**B111 13 088**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Rabu, 15 Februari 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua,**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620105 198601 1 001**

**Sekretaris,**

  
**Dr. Amir Ilyas, SH.,MH.**  
**NIP. 19800710 200604 1001**

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dwitha Riris Anggaini Nainggolan

NIM : B111 13 088

Bagian : Hukum Pidana

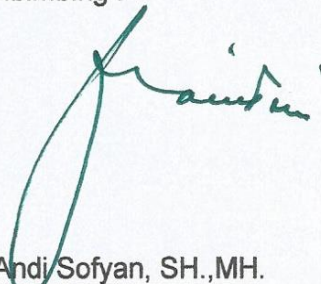
Judul : Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan  
Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota  
Makassar Tahun 2013-2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar,

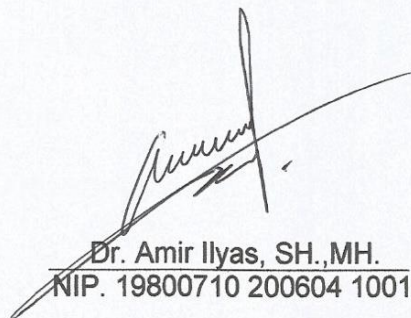
Januari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, SH.,MH.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, SH.,MH.  
NIP. 19800710 200604 1001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

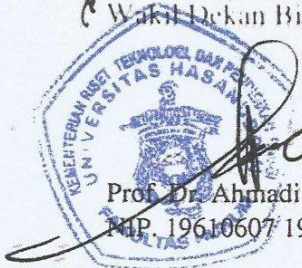
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DWITHA RIRIS, ANGGRAINY
Nomor Pokok	: B11113088
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Makassar Tahun 2013-2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2017

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH  
NIP. 196106071986011003

## **ABSTRAK**

**Dwitha Riris Anggraini Nainggolan (B111 13 088), Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (*Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015*). Dibawah Bimbingan **Andi Sofyan** Selaku Pembimbing I dan **Amir Ilyas** Selaku Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polrestabes Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi.

Selama penelitian ditemukan bahwa pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan tersangka Anak khususnya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum berjalan maksimal, baik dari pihak penyidik maupun penasihat hukum. Sehingga hak-hak tersangka/pelaku Anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya terjamin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Bantuan Hukum dari Penasihat Hukum dalam penanganan Anak yang melakukan tindak pidana berjalan sesuai aturan yang ditetapkan akan tetapi belum berjalan maksimal karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang Anak dan sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami peraturan tertulis tentang peradilan Anak berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan biaya transportasi yang tidak memadai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu Penulis sadari, maka dari itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai sarana pembelajaran dan media penyempurnaan.

Melalui kesempatan ini Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Richard M. Nainggolan dan Ibunda Susilawaty yang telah banyak memberi motivasi, bimbingan, saran, nasehat serta doa. Serta kakak dan adik Johannes Rendy Christianus dan Ruth Syeela Widianty.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
3. Prof. Dr. Hj. Farida Pattitingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, serta Wakil Dekan I

Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik. Atas bimbingan, arahan, dan waktunya yang diberikan kepada Penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai sekarang.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM., dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
7. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
8. Para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak berjasa mendidik Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



9. Kepada Bapak Briptu Adijaya selaku Anggota di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang telah membantu Penulis menyelesaikan proses penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
10. Kepada Bapak Rezki dan Bapak Feri selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan proses penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
11. Kepada Ibu Rosmiati S.H. selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, Bapak Bayu Resman S.H. selaku Penasehat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan proses penelitian Penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis, I Made Fajar Wikantara, Dolly Wattimena, Khusnul Khatimah Harunah Intang, Robert Lowell Saputan yang telah memberikan berbagai bantuan dan semangat terhadap Penulis.
13. Teman-teman KKN Gel. 83 desa Minasa Te'ne Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep yang telah memberikan semangat dan kerja sama yang baik.

Demikianlah dari Penulis. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri Penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, serta para pembaca pada umumnya. Amin.

Makassar, Februari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Skripsi .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi .....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
Bab II Tinjauan Pustaka.....	10
A. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3. Tindak Pidana Pembegalan .....	14
B. Bantuan Hukum .....	19
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	19



2.	Bantuan Hukum Ditinjau Dari Segi Kaidah Hukum	
	Positif.....	23
3.	Bantuan Hukum yang Diatur Dalam KUHAP .....	25
4.	Bantuan Hukum Dalam RUU KUHAP 2015 .....	28
5.	Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	29
6.	Hak Penasihat Hukum Mengikuti Jalannya	
	Pemeriksaan Penyidikan .....	32
C.	Penyidikan.....	35
1.	Pengertian Penyidikan.....	35
2.	Pejabat Penyidik.....	35
3.	Tugas Penyidik yang Berhubungan Langsung	
	Dengan Sisi Penegakkan Hak-Hak Asasi Anak .....	39
D.	Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	45
1.	Pengertian Anak.....	45
2.	Faktor-Faktor Terjadinya Kenakalan Anak.....	48
3.	Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	53
4.	Faktor Penghambat Pengembangan Hak-Hak	
	Anak Dalam Peradilan Pidana .....	55
E.	Kasus-Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar.....	56
Bab III	Metode Penelitian .....	58
A.	Jenis Penelitian .....	58
B.	Lokasi Penelitian .....	58
C.	Jenis dan Sumber Data.....	58

D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	61
A. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum .....	61
B. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	65
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anak Sebagai Pelaku .....	76
Bab V Penutup.....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat negara kita sebagai suatu negara hukum yang mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Sebagai tersangka, selama proses penyidikan ia berhak mendapat hak-haknya serta dinyatakan belum bersalah sebelum mendapat kekuatan hukum yang tetap. Hak-Hak tersangka tersebut antara lain adalah Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan Bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya; Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka; Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan dengan Bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya; Berhak memberi keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan; Berhak mendapat juru Bahasa; dan Hak mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukumnya selama dalam waktu dan pada



setiap tingkat pemeriksaan dan sebagainya<sup>1</sup>. Sehingga untuk lebih terjaminnya objektivitas dari pada pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka sudah seharusnya seorang tersangka pelaku tindak pidana didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan dilakukan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelanggar tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Baik dari faktor ekonomi, sosial, lingkungan, maupun perkembangan teknologi. Dampak negatif dari perkembangan pembangunan dan kemajuan teknologi yang cepat, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial dalam masyarakat sehingga sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku Anak, terlebih lagi terhadap Anak yang kurang mendapatkan bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap, pengawasan dari orang tua atau wali, tentu akan menyebabkan anak mudah terseret pada

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, S.H., 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 332.

pergaulan yang salah sehingga dapat membuka peluang bagi Anak untuk melakukan tindak pidana.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak yang melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Karena Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur social dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga, dsb. Dan perlu pertimbangan yang kuat saat memasukkan Anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk pada keadaan mental dan kepribadian Anak.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

*Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>2</sup>

Ketentuan yang mengatur masalah Anak yang melakukan tindak pidana secara khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.<sup>3</sup> Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

---

<sup>2</sup> Tim Divisi Media, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, PT. Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm.52.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.160.



yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Proses peradilan pidana anak dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Peradilan pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan Anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan Anak menjadi rendah.<sup>4</sup> Namun hal tersebut belum berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan.

Sampai sekarang masih banyak ditemukan Anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar yang bahkan dapat menyebabkan kematian, salah satu contohnya yaitu pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut pembegalan. Aksi begal motor di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu dan tempat. Korbannya pun bermacam-macam mulai dari wanita, karyawan, bahkan polisi dan pejabat TNI juga pernah menjadi korban pembegalan, dan

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Cet. 1, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4

anggota-anggotanya pun tidak sedikit yang masih dalam kategori Anak. Tetapi masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perlindungan hak-hak Anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakkan hukumnya. Terdapat pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Salah satu pelanggaran terhadap anak pada praktiknya di lapangan adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 51 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih

Penasehat Hukum. Bantuan Hukum itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan.”

Selain itu pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menyatakan: “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”. Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak dari proses penyidikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembegalan di kota Makassar dengan lokasi penelitian/studi kasus bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian bantuan hukum terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tersangka anak?
3. Faktor-faktor apakah yang dihadapi sebagai penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap tersangka anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur bantuan hukum terhadap tersangka anak dari prosedur menurut penyidik.
- c. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang dihadapi dalam proses pelaksanaan bantuan hukum kepada tersangka anak di tingkat penyidik.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna bagi pembaca, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan peranan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencurian dengan kekerasan.
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literature tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>5</sup>

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu:

- *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesai, Yogyakarta, hlm. 18.



disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>6</sup>

Menurut **Pompe**, pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:<sup>7</sup>

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.6.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur-unsur tindak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas daripada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam Bahasa Belanda disebut *element van de wettelijke delictsome schrijving*.<sup>8</sup>

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the main is guilty or actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention / opzet / dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

---

<sup>8</sup> Mohammad Eka Putra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU-Press, Medan, hlm. 103.

3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

**b. Unsur Objektif**

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
  1. *Act*, yakni berupa aktif atau perubahan positif
  2. *Omission*, yakni perubahan pasif atas perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan kebahagiaan.

- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sikap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larang atau perintah.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

### **3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dan biasa disebut dalam masyarakat dengan pembegalan, diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.

Menurut Mansour Faqih, kata “kekerasan” merupakan padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis

---

<sup>9</sup> Kanter E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.<sup>10</sup>

Pandangan Mansour Faqih itu menunjukkan pengertian fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid, dkk, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Malang, hlm. 31.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 ayat

(1) KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:



- a. Mempersiapkan atau
- b. Memudahkan atau
- c. Dalam hal tertangkap tangan
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
- e. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
  - a. Waktu malam
  - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
  - c. Di jalan umum
  - d. Dalam kereta api yang sedang berjalan.
  - e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
  - f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
  - g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
3. Dalam ketentuan pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3)

Ditambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4)

Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Dari rumusan Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancaman kekerasan.

## **B. BANTUAN HUKUM**

Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elite gereja terhadap para pengikutnya, hubungan kedermawanan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya. Suatu pola hubungan patron client jelas terpancar disini.<sup>12</sup>

Proses pemberian bantuan hukum kepada tersangka pelaku tindak pidana oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu merupakan suatu sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara Penyidik/ Penyidik Pembantu selaku Pemeriksa dan Penasihat Hukum selaku orang yang membantu dan melindungi segala kepentingan tersangka selama pemeriksaan. Dalam hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan dari masing-masing pihak mempunyai arti yang sangat penting karena langgengnya hubungan tersebut tergantung sejauh mana masing-masing pihak menempatkan diri sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan

---

<sup>12</sup> Adnan Buyun Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ce.3, LP3ES, Jakarta, hal.1

akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum<sup>14</sup>.

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah:<sup>15</sup>

1) *Legal aid*

Berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,

---

<sup>13</sup> H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, hlm. 158.

<sup>14</sup> Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 95.

<sup>15</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan*

*Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH, Jakarta. hlm. 13

- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

## 2) *Legal assistance*

Dalam pengertian ini. Makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada mereka yang miskin saja, tapi juga bagi mereka yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, S.H., 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 334.

### 3) *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”.<sup>17</sup> Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.<sup>18</sup>

Pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan,
- Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat mewujudkan kebenaran

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, cet.1, CV. Mandarmaju, Bandung, hlm.9.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 10.



hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin,

- Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

## **2. Bantuan Hukum Ditinjau Dari Segi Kaidah Hukum Positif**

Berbicara mengenai bantuan hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, hukum positif telah mengenal dua fase perkembangan di bidang bantuan hukum dalam perkara-perkara pidana:

### **1) Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 250 HIR.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 HIR, bantuan hukum yang diatur di dalamnya dapat dikatakan:

- Sekalipun dasar hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapatkan pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum,
- Namun HIR hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedang kepada tersangka pada proses pemeriksaan

penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian HIR belum memberi hak untuk mendapat dan berhubungan dengan seorang penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan,

- Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjukkan penasihat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.

## 2) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No.14/1970, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum pada bab VII, yang terdiri dari pasal 35 sampai dengan pasal 38.

Kalau diperhatikan lebih lanjut penggarisan bantuan hukum yang diatur dalam UU No.14/1970 tersebut, dapat disimpulkan:

- Telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Ketentuan ini memperlihatkan, asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting seperti yang dijelaskan pada pasal 35.

Akan tetapi UU No. 14/1970 belum sampai kepada taraf yang melakukan asas “wajib” memperoleh bantuan hukum. Masih dalam taraf “hak” mendapatkan bantuan hukum.

- Namun sekalipun asas memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana:
  - Telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan,
  - Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapa atau penahanan, baru bersifat “hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum”,
  - Bagaimana cara menghubungi dan cara meminta bantuan penasihat hukum, UU No. 14/1970 belum mengaturnya.<sup>19</sup>

### **3. Bantuan Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP**

Uraian aturan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP.

- Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksana daripada aturan umum yang digariskan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Sebagai peraturan pelaksana, pasal-pasal KUHAP tentang

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Op.cit*, hlm.346.

bantuan hukum bertitik tolak dari ketentuan pokok yang digariskan pada UU No. 14/1970.

- Tentang pengertian bantuan-bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP.

Seperti halnya pada UU No. 14/1970, KUHAP tidak begitu jelas memberi definisi bantuan hukum. Tidak dijumpai penjelasan yang membedakan pengertian definisi hukum seperti apa yang dikembangkan pada negara-negara yang sudah maju. Secara sepintas lalu pengertian bantuan hukum itu disinggung pada Pasal 1 butir 13 yang berbunyi: “Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.<sup>20</sup>

Secara harfiah lebih condong untuk mengartikan *legal assistance*. Sebab ketentuan Pasal 1 butir 13 itu sendiri mempergunakan istilah “penasihat hukum”. Tetapi jika dihubungkan perkataan penasihat hukum dengan perkataan “orang yang memberi bantuan hukum”, tampak seolah-olah orang yang dimaksud KUHAP dengan penasihat hukum sekaligus mencakup pengertian *legal aid* dan *legal assistance*. Karena seperti yang ada di dalam Pasal 1 butir 13 mengartikan: penasihat hukum ialah orang yang memberi bantuan hukum. Jadi, di dalamnya tercakup *legal aid* dan *legal assistance*. Berarti bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.347-348.

pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana:

- Baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin;
- Maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa.

Istilah penasehat hukum adalah istilah baru, sebelumnya dikenal istilah pembela, advokat, procurer ( pokrol ) dan pengacara. Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela seakan – akan berfungsi sebagai penolong tersangka dan terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal fungsi dari pembela atau penasehat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa. Meskipun demikian, penasehat hukum itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian – kejadian di sidang Pengadilan <sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 86.

#### **4. Bantuan Hukum Dalam RUU KUHAP 2015**

Di dalam RUU KUHAP 2015 Pasal 103 sampai dengan Pasal 108 menjelaskan bahwa Penasihat Hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan uraian sebagai berikut:

- Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka:
  - Hal itu dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap hari kerja,
  - Guna kepentingan pembelaan perkaranya.
- Apabila penasihat hukum menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara memberi:
  - Peringatan kepada penasihat hukum,
  - Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan antara penasihat hukum dan tersangka atau terdakwa tersebut akan disaksikan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara,
  - Apabila pengawasan tersebut masih disalahgunakan haknya, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan tersangka atau terdakwa.



- Penasihat hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan:
  - Guna kepentingan pembelaan,
  - Turunan berita acara dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari tersangka, terdakwa, atau dari penasihat hukumnya.
- Penasihat hukum berhak:
  - Mengirim surat kepada tersangka,
  - Menerima surat dari tersangka, dan
  - Hal itu dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya.
- Pengurangan kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa, terhitung sejak:
  - Setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan,
  - Dan tembusannya suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya.

## 5. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Dalam artikel yang berjudul *Legal Aid – Modern Themes and Variations*, Cappelletti dan Gordley mengembangkan jenis bantuan hukum berikut ini:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mulyana W. Kusumah, "Arti Penting Bantuan Hukum Struktual" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, hlm. 59.

- 1) Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual;
- 2) Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh *welfare state*.

Fakta saat ini, pekerjaan memberikan bantuan hukum dilakukan oleh:

- 1) Advokat atau Pengacara

Pengacara sering digandengkan penyebutannya dengan advokat, dua istilah ini memang sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hukum, khususnya pada litigasi. Perbedaan istilah diantara mereka lebih berkaitan dengan kompetensi saja. Untuk pengacara, wilayah bantuan hukum yang dapat ditanganinya adalah satu wilayah Pengadilan Tinggi, sedangkan advokat meliputi wilayah seluruh Indonesia, pengacara diangkat dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tempat pengacara itu berpraktek, untuk advokat pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

Pengertian advokat adalah seorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di

dalam pengadilan bagi kliennya sebagai mata pencahariannya.<sup>23</sup> Menurut Andi Hamzah advokat adalah seorang pembela dan penasehat, berhak membacakan pledoi yang dimulai dari tingkat pertama dan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung<sup>24</sup>. Advokat wajib memberikan bantuan pembelaan hukum kepada sejawat advokat atau penasehat hukum yang disangka atau didakwa dalam suatu perkara pidana oleh yang berwajib, secara sukarela baik secara pribadi maupun atas penunjukkan atau permintaan organisasi profesi.

## 2) Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdiri dari dua kelompok:<sup>25</sup>

- LBH Swasta

Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas dari sekadar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan meliputi dan ditujukan:

---

<sup>23</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court ; satu Proses di dewan Kehormatan Profesi*,

Djambatan, Jakarta, hlm.201.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 90.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Op.cit*, hlm.350.

- Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mempunya,
- Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya diperkosa,
- Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana,
- Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan cuma-cuma.

- LBH yang Bernaung pada Perguruan Tinggi

Menurut pengamatan, pada umumnya LBH yang bernaung pada perguruan tinggi kurang populer. Sebab pada kenyataannya yang tampil ke depan memberi bantuan hukum terdiri daripada mereka yang masih berstatus mahasiswa, sehingga menimbulkan anggapan kurang mampu melaksanakan bantuan hukum.

## **6. Hak Penasihat Hukum Mengikuti Jalannya Pemeriksaan Penyidikan**

Hak penasihat hukum dalam mengikuti pemeriksaan penyidikan dapat dilihat di dalam Pasal 115 KUHAP, yakni hak penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat:

- Fakultatif, dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik. Semata-mata tergantung pada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.
- Pasif, dalam arti kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya melihat dan mendengar isi dan jalannya pemeriksaan. Tapi tidak boleh ikut campur tangan dan ambil bagian memberikan nasihat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung.
- Sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara :
  - Penasihat hukum dapat hadir mengikuti jalannya pemeriksaan,
  - Tapi hanya melihat tanpa mendengar jalannya pemeriksaan (Pasal 115 ayat (2)).<sup>26</sup>
- Penasihat hukum berhak mendapat turunan berita acara pemeriksaan:
  - Guna kepentingan pembelaan,
  - Turunan berita acara dimaksud baru diberikan jika ada permintaan dari tersangka, terdakwa, atau dari penasihat hukumnya.
- Penasihat hukum berhak:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 353-354.

- Mengirim surat kepada tersangka,
  - Menerima surat dari tersangka, dan
  - Hal itu dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya.
- Pengurangan kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa, terhitung sejak:
- Setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan,
  - Dan tembusannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya.

## **C. PENYIDIKAN**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya ketentuan KUHP tentang penyidikan didefinisikan sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>28</sup>

### **2. Pejabat Penyidik**

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Op.cit*, hlm.109.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm. 161.

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik :

a. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah “pejabat polisi negara”. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Pejabat Penyidik Penuh*

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 27



Tahun 1983, yang adalah harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan,

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bitara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

## 2) *Penyidik Pembantu*

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik

pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Itu sebabnya yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

b. Pejabat Penyidik Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

### **3. Tugas Penyidik yang Berhubungan Langsung Dengan Sisi Penegakkan Hak-Hak Asasi Anak**

#### ***a. Penangkapan.***

Tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak, yang dapat menjadi tuntutan keadilan hukum terhadap tugas penegakkan hukum dari pemerintah (lembaga kepolisian). Tindakan-tindakan yang layak dari proses penangkapan anak telah dirumuskan oleh lembaga Prayuwana dengan rumusan-rumusan dasar seperti yang terjadi dalam delikueni anak (anak melakukan kejahatan) dan *kindermoor* (anak sebagai saksi korban) diisyaratkan agar penyidik yang ditugaskan melakukan penangkapan anak adalah *penyidik Polwan yang telah memenuhi syarat perundang-undangan*. Ibu atau wanita dipandang sebagai subjek yang langsung secara kodrati lebih memahami masalah anak secara komprehensif.

Jika perilaku penangkapan dilakukan kepada anak maka akan timbul hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum sebagai akibat dari belum dewasa, akan menjadi faktor pertimbangan bagi seorang penyidik dan penuntut umum sebagai upaya untuk membatasi *tindakan upaya paksa*. Ketentuan pasal 5 UU No.3 Tahun 1997 menentukan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Keleluasaan Wewenang menjadi asas dasar penyidik dalam Hukum Acara pidana Anak atau Peradilan Anak terhadap anak yang

berusia diatas delapan tahun. Dengan demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus.<sup>29</sup> Hak-hak yang dimaksud untuk mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan adalah:

- 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka untuk wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
- 2) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata sebagai upaya paksa, atau wewenang paksa;
- 3) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut);
- 4) Tersangka anak atau orang yang belum dewasa harus segera mendapat proses pemeriksaan;
- 5) Hak untuk mendapat atau menuntut ganti rugi, sebagai akibat dari kesalahan penangkapan, penahanan atau hal-hal lain

---

<sup>29</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 65.

yang menghilangkan penderitaan fisik dan moral anak tersebut.<sup>30</sup>

Penyidik di dalam melakukan operasi di saat seorang anak tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana tidak diajarkan menggunakan alat yang dikategorikan sebagai pelumpuh atau alat pemaksa yang digunakan oleh rasio UU Militer untuk dijadikan sebagai senjata api, atau teknologi militer lainnya. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah:

1) Sebagai tersangka

- a. Hak-hak anak yang bersandar pada asa praduga tak bersalah;
- b. Hak-hak anak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dari kekerasan);
- c. Hak untuk didampingi pengacara;
- d. Hak untuk mendapat fasilitas.

2) Sebagai saksi korban

- a. Hak anak untuk dilayani karena penderitaan mental, fisik, dan rohani atau penyimpangan perilaku sosial;

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm.66.

- b. Hak untuk didhului di dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;
- c. Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

***b. Penahanan***

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memiliki klarifikasi yang khusus. Penahanan terhadap tersangka yang digolongkan oleh KUHAP dengan Tahanan Rumah Negara, Tahanan Rumah (Keluarga), dan Tahanan Kota mendapat dispensasi dari ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh pasal 44 Undang-Undang No. 3/1997 tentang Peradilan Anak, yaitu penahanan anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di lingkungan Rumah Tahanan Negara, atau Cabang rutan dana tau diperbolehkan di tempat tertentu yang disediakan untuk itu.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Menurut Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

Anak yang melakukan tindak pidana harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan), atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.



## **D. ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

### **1. Pengertian Anak**

Sampai saat ini masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian Anak. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia bersifat pluralisme sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda.

#### **a. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan**

- Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang

telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan pernikahan”.

- Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 UU Perlindungan Anak menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

#### **b. Pengertian Anak Nakal**

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Dr. Wagati Soetodjo, SH., M.S., 2008, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.8.

Tim proyek *Juvenile delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Desember 1967 (dalam Romli Atmasasmita, 1983:23) memberikan perumusan mengenai *Juvenile delinquency* sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

## **2. Faktor-Faktor Terjadinya Kenakalan Anak**

Dalam masalah delikueni anak, terdapat uraian teori-teori yang bertujuan mencari faktor-faktor terjadinya kenakalan anak, teori-teori tersebut antara lain:<sup>32</sup>

### **a. Teori Anomie**

Salah seorang tokoh dari teori *Anomie* ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim. *Anomie* dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan

---

<sup>32</sup> Nandang Sambas, *Op.cit*, hlm. 121-131.

perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Menurut Durkheim, tren sosial, dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan, dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, secara bertahap sistem akan runtuh dan masyarakat berada dalam kondisi *anomie*.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menunjuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Travis Hirschi menjelaskan bahwa kontrol sosial meliputi unsur-unsur: **Attachment**, mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Seseorang yang melanggar norma-norma masyarakat, berarti ia tidak peduli dengan pandangan, pendapat serta kepentingan orang lain. Sehingga ia tidak merasa terikat lagi dengan norma-norma masyarakat dan akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. **Commitment**, mengacu kepada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perilaku delikuen. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang, berarti di benak pikirannya telah terjadi proses

perhitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu. **Involvement**, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah berpikir apalagi melibatkan diri dalam perilaku delikuen. Seseorang terlibat dalam berbagai kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan konvensional itu. **Belief**, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku delikuen pada umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan kemampuan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat konvensional dan pada gilirannya merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

c. Teori Sub-Budaya Delikuen

Kaitannya dengan masalah delikuen anak, teori subbudaya delikuen ini dijelaskan oleh Albert Cohen. Cohen, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delikuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delikuen di kalangan remaja bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau "*status frustration*". Akibatnya keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya semakin meningkat.

Reaksi penolakan terhadap anak-anak kelas bawah cenderung membawa mereka tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatan mereka. Hal inilah yang mendorong mereka ke arah keterlibatannya dalam kegiatan "*delinquen boy*".

#### d. Teori Labelling

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- 2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- 3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa.
- 4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok kriminal dan nonkriminal.

- 5) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- 6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggaranannya.
- 7) Usia, tingkatan sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- 8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- 9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan sub kultur serta menghasilkan "*rejection of the rejector*".

e. Teori Kesempatan

Dipaparkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, bahwa munculnya subcultural delikuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kesempatan criminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan



diri dalam subcultural kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Apabila kesempatan kejahatan tidak terbuka, maka kelompok remaja itu akan melakukan reaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat terlarang terdapat dihadapannya dan kesempatan untuk menggunakannya terbuka, maka kultur penggunaan obat terlarang akan tumbuh di kalangan mereka.

### **3. Hak-hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**

Wujud dari keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Perlu kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa yang dimengerti anak.

- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP).
- g. Setiap anak mempunyai hak sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispas dan untuk arsip.
- k. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dr. Wagati Soetodjo, SH., M.S., *Op.cit*, hlm. 70.

Hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya<sup>34</sup>.

#### **4. Faktor Penghambat Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Peradilan Pidana**

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 71.

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

#### **E. Kasus-Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Di Makassar**

1. Pencurian dengan kekerasan atau Pembegalan dilakukan tersangka Bayu Santoso yang berumur 16 tahun, bersama tiga orang rekannya yang hingga kini masih buron. Pembegalan itu dilakukan di bawah jalan layang Makassar. Saat itu, tersangka membegal dua korban perempuan Hardianti dan Mira, warga Kabupaten Pangkep.

Kasus itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 8 Oktober 2015 dengan nomor perkara BP/122/IX/2005/Reskrim. Pada akhirnya, tersangka dilepas tanpa melalui proses persidangan karena masih di bawah umur. Menurut Humas Pengadilan Negeri Makassar Ibrahim Palino dikembalikanya tersangka adalah setelah melalui proses diversi (mediasi) antara pihak keluarga korban dan tersangka.

2. AD alias Baba (15) merupakan begal yang sudah beraksi sebanyak 2 kali dalam satu pekan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap tim Resmob Unit Reskrim Polsek Rappocini.

AD ditangkap di Jalan Toddopuli 1, Kelurahan Kassi kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar tanpa perlawanan.

Kepada penyidik, AD mengaku telah membegal dan menghadang seorang pelajar SMP yang tengah melintas di Jalan Hertasning Makassar. Selain itu, pelaku juga merampas handphone saat korban sedang mengisi bensin di SPBU Hertasning Makassar.

Kapolsek Rappocini, Kopol Muari mengatakan pelaku melakukan aksinya bersama rekannya dari Kabupaten Gowa bernama Ibnu alias Inu.

Polisi pun kemudian melakukan penelusuran ke rumah Ibnu di Gowa, namun orang tua Ibnu mengaku bahwa anaknya telah direhabilitasi di panti dinas sosial.

“Anggota kami langsung mengecek ke Dinas Sosial di Pettarani. Dan selanjutnya melakukan koordinasi dari pihak dinsos bahwa anak tersebut direhab di YKP2N Jalan Faisal 12 Makassar,” kata Muari, Sabtu (30/7/2016).

Muari menyebutkan, anggota pun melakukan penelusuran ke YKP2N, dan diperoleh informasi bahwa Ibnu telah diserahkan orang tuanya untuk mengikuti rehab di YKP2N.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empirik. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada Undang-Undang dan Yurisprudensi, serta penelitian empirik yaitu penelitian yang berlandaskan pada fakta yang diperoleh di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dan Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

## **E. Teknik Analisis Data**

Penulisan ini menggunakan sistem analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat langsung dari lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kuantitatif, melalui pendekatan normatif.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang tersangka yang tersangkut dalam suatu perkara pidana berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat di tempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka.

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Pemberian Bantuan Hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang suda berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau secretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8. Orang yang melaksanakan pemberian Bantuan Hukum pada kantor pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Dosen, Mahasiswa FH yang memenuhi syarat, dan Paralegal. Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, dan lembaga pemerintah

yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum. Paralegal harus terdaftar pada salah satu Kantor Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, serta wajib tunduk dan patuh terhadap kode etiknya. Paralegal dibutuhkan dalam kegiatan pencerahan hukum sebagai bukti rencananya akan dibuat sertifikasi dari Organisasi Advokat kepada paralegal yang lolos kualifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Paralegal ini juga dapat berupa mahasiswa.

LBH atau Orkemas untuk dapat memberikan Bantuan Hukum sesuai Pasal 7 UUBH wajib lolos verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan Kemenkumham melalui Tim Panitia khusus yang unturnya dari kementerian, akademis, tokoh masyarakat, dan lembaga atau orgaisasi pemberi layanan Bantuan Hukum.

Prosedur memperoleh Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang berbunyi:

- 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, ataupejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

- 2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi:

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pendanaan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dimana Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Pasal 16 berbunyi:

- 1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan untuk Bantuan Hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah wajib mengalokasikan data penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Namun terkait pendanaan tersebut, daerah juga dapat mengalokasikan dananya untuk Bantuan Hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi:

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## **B. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana**

Telah dijabarkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum serta didampingi oleh pemberi bantuan hukum atau penasehat hukum, baik Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Nakal), Anak korban, maupun Anak saksi.

Fungsi LBH dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum antara lain adalah:

1. Memberikan pendampingan secara psikologis terhadap Anak.
2. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan membuat layanan komunitas Anak, khususnya bagi Anak pelaku tindak pidana ringan.
3. Melakukan promosi atau kampanye tentang perlindungan perempuan dan Anak.
4. Mendorong kebijakan-kebijakan keadilan gender dan Anak.

Adapun peranan LBH dalam penanganan Anak yang melakukan tindak pidana dengan bentuk pendampingannya:

1. Melakukan pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Melakukan pendampingan ketika Diversi dilakukan.
3. Memberikan pembelaan di persidangan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum di tingkat penyidikan dalam rangka pembelaan perkara, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan surat kuasa sebagai dasar sahnya mendampingi tersangka, jika tidak ditunjuk oleh penyidik.
- 2) Memeriksa dan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Jika ditemukan surat-surat tersebut tidak sah maka dapat diajukan praperadilan (Pasal 77 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengajukan permohonan untuk tidak ditahan atau permohonan penangguhan penahanan jika diperlukan,
- 4) Meminta kepada penyidik agar segera memeriksa tersangka.
- 5) Mendampingi tersangka pada saat penyidikan dari awal sampai akhir. Perhatikan, dengar, catat dengan baik setiap tanya jawab antara tersangka dan penyidik.

- 6) Ajukan keberatan apabila penyidik dalam memeriksa tersangka ada unsur paksaan atau kekerasan sehingga membuat tersangka ragu dan tidak bebas memberikan keterangan.
- 7) Mengajukan keberatan ketika petugas menggunakan pakaian dinas.
- 8) Ajukan saksi yang meringankan bagi tersangka jika ada.
- 9) Meminta kepada penyidik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka.

Berbicara mengenai keefektifitasan dari implementasi pemberian bantuan hukum, maka tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Tentu jika suatu aturan hukum ditaati oleh target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka aturan hukum itu adalah efektif. Namun, sekalipun dapat dikatakan efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya.

Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatannya sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum itu sendiri benar-benar cocok dengan

nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.<sup>35</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar dan Kantor Polrestabes Makassar, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar**

Lembaga Bantuan Hukum APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang fokus pada penanganan kasus perempuan dan anak berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan hukum. LBH APIK Makassar melakukan pendampingan hukum baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. LBH APIK juga memiliki jaringan, baik itu pemerintah atau swasta yang berkaitan dengan penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga beberapa kasus merupakan rujukan dari pada lembaga lain.

Penulis melakukan pengumpulan data tentang jumlah pendampingan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melakukan wawancara kepada Bapak Bayu Resman selaku Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum APIK

---

<sup>35</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol.1. *Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, Hal.375.



Makassar. Beliau sudah bekerja sebagai Penasihat Hukum di LBH APIK Makassar selama 4 tahun dan sudah mengikuti pendidikan Advokat sebelumnya.

Tahapan pendampingan LBH APIK terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebelum melakukan pendampingan, LBH APIK memerlukan persetujuan dari wali Anak. Sebab pada tahapan pertama pendampingan melakukan penandatanganan surat kuasa yang dilakukan pendampingan hukum, baik ditahap penyidikan, penututan, hingga persidangan. Tidak hanya pendampingan hukum, LBH APIK juga melakukan upaya pemulihan psikologi Anak yang berkonflik dengan hukum sebab beberapa kasus memerlukan adanya proses konseling dan pemulihan keadaan psikologis anak, terkhusus bagi Anak sebagai korban.

Adapun program LBH APIK Makassar, yaitu:

- a. Pembentukan sekolah pelopor keadilan.
- b. Peningkatan kapasitas paralegal.
- c. Perekrutan paralegal baru.
- d. Kampanye 16 hari anti kekerasan seksual,
- e. Diskusi rutin komunitas.
- f. Pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama Makassar.
- g. Mendorong pembentukan undang-undang anti kekerasan seksual.
- h. Pembentukan perda aksesibilitas kota Makassar.

- i. FGD lintas institusi terkait penanganan kasus kekerasan seksual.
- j. Pelatihan aparat penegak hukum se-kota Makassar.
- k. *Roadshow* media, yaitu Koran Fajar, Tribun, Berita Kota Makassar, Keker.
- l. Pelatihan jurnalistik berperspektif Anak dan perempuan.
- m. Pelatihan aparat penegak hukum terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut data yang penulis dapatkan dari Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar.

**Tabel 1**  
**Jumlah pendampingan LBH APIK terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2013-2015**

No.	Jenis Kelamin	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Laki-Laki	-	1	1
2	Perempuan	-	-	-

Sumber: Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, Desember 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pendampingan LBH APIK terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan tergolong sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah berita-berita yang sering kita dengar terkait dengan kasus pencurian

dengan kekerasan. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, seperti banyaknya jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Makassar sehingga pendampingan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan juga terbagi di berbagai LBH. Salah satu faktor yang juga bisa menjadi penyebabnya adalah karena kurangnya panggilan atau pemberitahuan dari pihak berwajib kepada LBH untuk melakukan pendampingan.

Hal ini dinyatakan oleh Bapak Bayu Resman selaku Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar yang mengatakan:

**“Kalau pendampingan untuk Anak yang kasus pencurian dengan kekerasan ini kurang banyak dari sini karena panggilannya kurang juga sebenarnya. Lebih banyak panggilan untuk kasus-kasus yang bersangkutan dengan perempuan atau Anak sebagai korban”**

## **2. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Menurut Pihak Penyidik Polrestabes Makassar**

Dalam proses penelitian di Kantor Polrestabes Makassar, penulis melakukan wawancara kepada dua orang penyidik yaitu dengan Bapak Rezki dan Bapak Feri dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian fakta tentang implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka Anak.

Dalam proses penelitian, penulis melakukan wawancara [dengan](#) Bapak Rezki dan Bapak Feri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai pemberian bimbingan Penasihat Hukum terhadap tersangka Anak. Akan tetapi kedua penyidik yang penulis wawancarai ini memberikan jawaban yang tidak sama mengenai pemberian bimbingan Penasehat Hukum kepada tersangka Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bapak Rezki selaku Penyidik pertama mengatakan bahwa:

**“Setiap tersangka Anak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, apabila tersangka Anak menolak untuk didampingi seorang Penasihat Hukum, maka pihak penyidik itu sendiri yang akan memanggil pihak Penasihat Hukum untuk membimbing tersangka Anak.”**

Sedangkan Bapak Feri selaku Penyidik kedua mengatakan bahwa:

**“Pendampingan Penasihat Hukum terhadap tersangka Anak itu merupakan haknya, jadi apabila tersangka Anak menolak untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum pada tahap penyidikan, maka proses penyidikan akan tetap dilakukan tanpa adanya Penasihat Hukum, tetapi kehadiran orang tua atau wali dari pihak tersangka Anak adalah wajib.”**

Selain itu, sikap dari kedua penyidik yang saya wawancarai terhadap tersangka Anak yang residivis juga berbeda.

Bapak Rezki selaku penyidik pertama mengatakan bahwa:

**“Perlakuan terhadap tersangka Anak semuanya adalah sama meskipun residivis”**

Sedangkan Bapak Feri selaku penyidik kedua mengatakan bahwa:

**“Perlakuan terhadap tersangka Anak yang residivis itu harus berbeda dengan tersangka Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, yaitu harus lebih tegas lagi. Biasanya Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu melakukan hal itu karena bujukan dari teman-temannya yang lebih tua atau temannya yang lebih berpengalaman, ya bisa dibilang karena dia merasa harus setia kawan saja, jadi masih bisa ditoleransi sedikit.**

Tapi untuk Anak yang sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali itu biasanya kita lebih keras dengan tujuan si Anak ada lah rasa efek jeranya begitu”

~~M~~Kemudian mengenai Penasihat Hukum yang dipanggil untuk mendampingi tersangka Anak, memang mereka hadir dan melakukan tugasnya, ~~a~~Akan tetapi tugas itu tidak dijalankan dengan maksimal.

Bapak Feri mengatakan bahwa:

**“Kalau soal Penasihat Hukum, sebenarnya kehadiran Penasihat Hukum untuk pemeriksaan tersangka Anak itu bisa dibilang sangat membantu proses pemeriksaan karena kalau si Anak ini tidak mengerti maksud pertanyaan dari penyidik, Penasihat Hukum ini bisa bantu menjelaskan ke tersangka Anak. Tapi kan Penasihat Hukumnya itu tidak selalu hadir pada saat pemeriksaan”**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Rezki yang menjelaskan bahwa:

**“Ya faktanya penasehat hukum pada umumnya cuma datang di hari pertama penyidikan saja, atau bahkan datang selama beberapa jam saja sampai jam istirahat atau makan siang habis itu tidak muncul lagi. Biasanya itu Penasihat Hukum susah datang rutin mungkin karena tidak ada biaya transportasinya, jadi pendampingannya juga tidak berjalan maksimal. Biasanya mereka datang hari pertama saja**

**kemudian kembali mendampingi lagi di pengadilan. Jadi tidak bisa juga dibilang salah karena mereka itu hadir, cuma tidak selalu hadir, tidak rutin begitu”**

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka Anak, pastilah tidak sedikit Anak yang takut atau ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik. Namun hal itu tidak menjadi hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan proses pemeriksaan.

Bapak Rezki mengatakan bahwa:

**“Kalau hal itu terjadi maka penyidik biasanya hanya akan melewati saja pertanyaan tersebut, terus lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain karena yang penting itu ada bukti dan saksi, jadi kalau ada pertanyaan yang si Anak tidak mau jawab atau takut menjawab, itu tidak terlalu dipusingkan”**

Kemudian Bapak Feri sendiri juga mengatakan bahwa:

**“Penyidik mengizinkan tersangka untuk berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya terlebih dahulu agar bisa menjawab pertanyaan yang diberikan”**

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anak Sebagai Pelaku**

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya pemberian bantuan hukum secara maksimal menurut pihak Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar yang dihadapi dalam tahap penyidikan, antara lain:

1. Perspektif aparat penegak hukum terhadap kondisi Anak masih kurang.
2. Aparat penegak hukum masih kurang memahami hukum terhadap Anak, dalam hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan.
3. Aparat penegak hukum sering menyudutkan tersangka Anak.
4. Penyidik berbicara dengan nada bicara yang keras dan mendesak sehingga tersangka Anak merasa takut dan ragu untuk angkat bicara.
5. Penyidik tidak merujuk ke LBH ketika ada orang tua yang menolak atau tidak menginginkan anaknya untuk didampingi dengan alasan aib keluarga.



Faktor-faktor penghambat ini dinyatakan oleh Bapak Bayu Resman selaku Penasehat Hukum di LBH APIK Makassar yang mengatakan bahwa:

**“Faktor-faktor penghambatnya itu ya seperti perspektif aparat penegak hukumnya tidak paham kondisi si Anak dan kurang paham juga soal hukumnya itu yang Undang-Undang SPPA. Terus si Anak juga biasa disudutkan jadi tidak nyaman juga. Terkadang juga penyidikanya itu bertanya pakai nada bicara yang tinggi atau keras, kadang juga ada yang masih pakai pakaian dinas padahal harusnya tidak boleh itu kalau sudah menyangkut Anak”**

Dalam hal ini penulis juga menanyakan bagaimana respon dan apa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum apabila hal-hal yang menjadi penghambat berjalannya pendampingan tersebut terjadi. Kemudian Bapak Bayu Resman mengatakan bahwa:

**“Biasanya kita arahkan lagi dulu ke penyidikanya untuk kasih waktu untuk si Anak supaya tenang dulu baru lanjutkan lagi proses penyidikan, terus kalau penyidikanya bicara dengan nada bicara yang keras, kita mengajukan keberatan kalau itu sudah tidak wajar menurut kami untuk seorang Anak. Kita juga tegur kalau ada yang pakai pakaian dinas karena harusnya kan tidak boleh. Jadi kita perlu kasih arahan dulu lagi”**

Pada dasarnya tugas pokok Penasihat Hukum adalah untuk memberikan *legal opinion* serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan) Penasihat Hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Seorang Penasihat Hukum kepada tersangka pelaku tindak pidana dapat dicari sendiri oleh tersangka atau keluarganya dan oleh Penyidik dalam hal tersangka. Dari ketentuan Undang-Undang SPPA yang mewajibkan diberikannya bantuan hukum kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, maka apabila tersangka Anak menolak adanya bantuan hukum, pihak aparat penegak hukum lah yang harus memanggil pihak LBH untuk memberikan kesediaan penasihat hukum untuk membimbing Anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, terlihat sangat jelas kurangnya pemahaman pihak pemeriksa tentang bagaimana aturan dan ketetapan tertulis tentang sistem peradilan pidana Anak. Terlebih lagi dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang sedang marak di lingkungan masyarakat ini telah mengundang emosi masyarakat tidak terkecuali para aparat penegak hukum sehingga mereka lupa akan status pelaku sebagai Anak dan tidak lagi memperhatikan hak-haknya.

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam proses pemeriksaan di pengaruhi oleh sikap dan tindakan Penyidik dan Penasihat Hukum itu sendiri yang didapat dari pengetahuan. Pengetahuan Penyidik dan Penasihat Hukum dapat berupa pemahaman mengenai aturan-aturan

tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang di tangani, prosedur yang harus di lakukan dalam memberi bantuan hukum kepada seorang tersangka Anak selama proses pemeriksaaan, aturan-aturan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan kerjanya dan pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain dalam memberi bantuan hukum kepada seorang tersangka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sikap dan tindakan Penasihat Hukum selama penyidikan berlangsung cenderung respon atas sikap dan tindakan Penyidik selama melakukan pemeriksaan. Sedangkan dalam Pasal 115 KUHAP dikatakan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan proses pemeriksaan, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar saja. Hal ini bisa saja terjadi karena sikap penyidik dalam proses pemeriksaan tersangka Anak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Apabila Penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penasihat Hukum akan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku juga, demikian sebaliknya.
2. Prosedur memperoleh Bantuan Hukum yaitu dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen

yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan apabila tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis.

Kemudian pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari Hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan tersangka Anak khususnya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan belum berjalan maksimal baik dari pihak yang melakukan pemeriksaan maupun pihak pemberi bantuan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan beberapa faktor di antaranya adalah kurangnya pemahaman pihak penegak hukum mengenai aturan peradilan Anak dan bagaimana penerapan sikap yang seharusnya diterapkan terhadap tersangka Anak, kemudian tidak adanya biaya transportasi bagi penasihat hukum yang menyebabkan penasihat hukum sulit menghadiri proses pemeriksaan secara rutin.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat saya berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Adanya komunikasi antara Pemeriksa dan Penasihat Hukum sebelum pemeriksaan di lakukan menurut saya akan sangat membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum kepada tersangka Anak karena masing-masing pihak sudah mengetahui akan status dan tugasnya sehingga pada saat pemeriksaan di lakukan, baik Pemeriksa maupun Penasihat Hukum akan berperan sesuai dengan peranannya masing-masing.
2. Penegakkan hukum yang lebih efektif bagi segala tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, agar tidak terjadi revidisi atau pengulangan tindak pidana.
3. Penegasan terhadap segala aturan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sudah ditetapkan.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku :

- Abdul Wahid, dkk. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama : Malang
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Vol.1. Pemahaman Awal*. Kencana: Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES: Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, dkk. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. LBH Jakarta: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- , 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- , 2006. *KUHP & KUHPA*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- , 2009. *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandarmaju: Bandung.
- Dr. Wagianti Soetodjo. 200. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Kanter E.Y. & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta.
- Kuffal H.M.A. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. UMM Press: Malang.
- Luhut M.Pangaribuan. 1996. *Advokat dan Contempt of Court ; satu Proses di dewan Kehormatan Profesi*. Djambatan: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ( Penyidikan dan Penuntutan )*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, *“Arti Penting Bantuan Hukum Struktural”* dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. PT. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soejono Soekanto. 1990. *Sosiologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tim Divisi Media. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. PT. Visimedia Pustaka: Jakarta.



**Lainnya :**

Hariandi Law Office. 2015. *Pembegalan Adalah Pencurian Disertai*

*Dengan Kekerasan* dari <http://m.gresnews.com/berita/tips/6053-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/> . Pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 12:52 Wita.

Sulis Setyowati. 2015. *RUU KUHAP 2015* dari

<http://slissety.wordpress.com/ruu-kuhap-2015/> . Pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 10:44 Wita.

Hasan Basri. 2016. *Tersangka Begal Makassar Bebas, Ini Penjelasan*

*Pengadilan* dari <http://makassar.tribunnews.com/2015/10/27/tersangka-begal-makassar-bebas-ini-penjelasan-pengadilan> . Pada tanggal 7 November 2016 pukul 05:33 Wita.

Muh. Fadly. 2016. *Astaga... Masih 15 Tahun Sudah Membegal, Mau Jadi*

*Apa? Ditangkap di Toddopuli 1* dari <http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/07/30/astaga-masih15-tahun-sudah-membegal-mau-jadi-apa-ditangkap-di-toddopuli-1/>. Pada tanggal 7 November 2016 pukul 05:45 Wita.

# LAMPIRAN



# Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Indonesian Women's Association for Justice

## SURAT KETERANGAN

No : 001/SK-01/LBH-APIK-MKS/2017

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosmiati Sain, SH.

Jabatan : Direktur LBH APIK Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 (Perumahan Budi daya Permai Blok D. No. 3)

Dengan Ini menerangkan Bahwa :

Nama : Dwitha Riris Anggrainy

Nim : B111 13 008

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Pendidikan : S1

Bahwa benar yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di LBK APIK Makassar untuk memperoleh data terkait judul Skripsi yakni *"pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan"*

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 Januari 2017

  
**ROSMIATI SAIN, SH.**  
Direktur

*Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan*

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12  
Perumahan Budi Daya Permai Blok C No. 12 / D No. 3  
Makassar - Sulsel 90245  
Telp : (62-411) 583911 / 585253 Fax : (62-411) 583911  
e-mail : lbh\_apikmks@yahoo.co.id





**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : SKP / 136 / XII / 2016 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor : 16504 / UN4.5.3 / PL.02 / 2016, Tanggal 01 Desember 2016. Perihal izin penelitian.
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes No Agenda : B / 2755 / XI / 2016 / Sium, tanggal 5 Desember 2016.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : **DWITHA RIRIS ANGGRAINY**  
Nomor Pokok : B11113088  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat kampus : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

**“ PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “**

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 13 Desember 2016

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR**  
**KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR**



**Tembusan :**

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unhas Mksr.